



Jakarta, 22 Mei 2024

No : 134/IJRS/S-Kel/B2/V/2024
Perihal : Undangan Peserta dalam Diskusi Publik "Arah Kebijakan Bantuan Hukum ke Depan yang Berperspektif Kelompok Rentan" Dalam Rangka Pekan Open Government 2024
Lampiran : Kerangka Acuan Kegiatan

Kepada Yth
Bapak/Ibu Perwakilan Lembaga
(Daftar Undangan Terlampir)
Di Tempat

Dengan hormat,
Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Isu Akses Keadilan yang terdiri dari Asosiasi LBH APIK Indonesia, PBHI, IJRS, dan YLBHI bersama BPHN telah bekerjasama dalam melakukan refleksi implementasi UU Bankum sejak beberapa tahun terakhir, diantaranya melalui Konferensi Bantuan Hukum Nasional tahun 2018 dan 2019, melakukan survei bantuan hukum, serta berbagai dukungan penguatan standar layanan bantuan hukum.
Oleh karena itu, Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Isu Akses Keadilan bermaksud untuk membuka ruang diskusi antara masyarakat sipil, dan OBH untuk dapat memperoleh *update* terhadap RUU Bankum, termasuk untuk saling memberi masukan terhadap proses maupun muatan dalam RUU Bankum ini sendiri.
Dengan demikian, bertepatan dengan Pekan Open Government 2024, sebagai bentuk keterbukaan untuk partisipasi dan transparansi penyusunan kebijakan, kami bermaksud mengadakan Diskusi Publik bertajuk "**Arah Kebijakan Bantuan Hukum ke Depan yang Berperspektif Kelompok Rentan**" yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu : 13.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang DH-4, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jl. Taman Suropati No. 2. Jakarta Pusat.
Zoom : bit.ly/Diskusi-RUU-Bankum-2024

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu perwakilan Lembaga untuk berkenan hadir dalam kegiatan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Gladys Nadya (0877-8501-2147). Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Adery Ardhan Saputro, S.H., LL.M
Plt Direktur Eksekutif IJRS



KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Diskusi Publik

“Arah Kebijakan Bantuan Hukum ke Depan yang Berperspektif Kelompok Rentan”

Dalam Rangka Pekan Open Government 2024

28 Mei 2024 13.00 – 16.00 WIB

I. Latar Belakang

Terbitnya Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bankum) telah membuka akses bagi masyarakat miskin terhadap keadilan dengan adanya pendampingan hukum secara cuma-cuma di seluruh Indonesia. Pemerintah telah mewujudkan mandat dari UU Bankum melalui Program Bantuan Hukum Nasional dengan berkolaborasi dengan masyarakat sipil, terkhusus dengan Organisasi Bantuan Hukum.

Setelah perjalanan 12 (dua belas) tahun tersebut, terdapat berbagai dinamika, tantangan, dan pembelajaran penting yang menjadi catatan terkait kriteria, akses, pendanaan, dan berbagai aspek lainnya. Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Isu Akses Keadilan yang terdiri dari Asosiasi LBH APIK Indonesia, PBHI, IJRS, dan YLBHI bersama BPHN telah bekerjasama dalam melakukan refleksi implementasi UU Bankum sejak beberapa tahun terakhir, diantaranya melalui Konferensi Bantuan Hukum Nasional tahun 2018 dan 2019, melakukan survei bantuan hukum, serta berbagai dukungan penguatan standar layanan bantuan hukum. Dari berbagai kolaborasi dan langkah pengawalan yang dilakukan, kemudian berkontribusi kepada langkah baik yang saat ini sedang dilakukan BPHN yaitu penyusunan naskah akademik dan draft revisi rancangan Undang-undang Bantuan Hukum (UU Bankum). Berdasarkan berbagai riset yang dilakukan, ditunjukkan bahwa kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap UU Bankum menjadi penting khususnya dalam memastikan perlindungan bagi tidak hanya kelompok miskin, namun juga kelompok rentan lainnya. Hal ini juga perlu dipastikan bagaimana peran daerah dalam menjalankan praktik bantuan hukum sesuai dengan mandat dalam RUU Bankum yang sedang disusun.

Oleh karena itu, Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Isu Akses Keadilan bermaksud untuk membuka ruang diskusi antara masyarakat sipil, dan OBH untuk dapat memperoleh *update* terhadap RUU Bankum, termasuk untuk saling memberi masukan terhadap proses maupun muatan dalam RUU Bankum ini sendiri. Dengan demikian, bertepatan dengan Pekan Open Government 2024, sebagai bentuk keterbukaan untuk partisipasi dan transparansi penyusunan kebijakan, kami bermaksud mengadakan Diskusi Publik bertajuk **“Arah Kebijakan Bantuan Hukum ke Depan yang Berperspektif Kelompok Rentan”**



II. Tujuan

Diskusi publik bertujuan:

1. Membuka ruang diskusi untuk *update* terkait RUU Bankum;
2. Memberi masukan terhadap proses maupun muatan dari RUU Bankum;
3. Mengetahui peran pemerintah daerah dan langkah penguatan yang dapat dilakukan dalam menjalankan pemberian bantuan hukum secara merata.

III. Pelaksanaan kegiatan

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024

Waktu : 13.00 – 16.00 WIB

Tempat : Ruang DH-4, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jl. Taman Suropati No. 2. Jakarta Pusat.

Zoom : bit.ly/Diskusi-RUU-Bankum-2024

IV. Narasumber

1. *Perwakilan Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)* (10 menit)
Membahas terkait perkembangan proses maupun muatan RUU Bankum dan proses harmonisasi antar K/L
2. *Asosiasi LBH APIK Indonesia* (10 menit)
Membahas aspek *safeguarding* dalam bantuan hukum, baik bagi penyelenggara maupun penerima bantuan hukum
3. *Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)* (10 menit)
Membahas terkait administrasi bantuan hukum yang mengakomodasi kerentanan penerima bantuan hukum, termasuk mengenai pembuktian kerentanan dan alternatifnya
4. *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* (10 menit)
Membahas terkait pentingnya dukungan anggaran yang inklusif dan responsif gender, termasuk anggaran untuk layanan dukungan
5. *Perwakilan Pemerintah Daerah Yogyakarta* (10 menit)
Membahas terkait peran pemerintah daerah dalam bantuan hukum, termasuk terkait praktik dari Perda Bankum



V. Peserta

Peserta kegiatan ini meliputi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia; perwakilan Kementerian/Lembaga; akademisi; publik secara umum serta media.

Peserta tatap muka (onsite)

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
2. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Nasional
3. IJRS
4. LBH Jakarta
5. LBH APIK Jakarta
6. LBH Mawar Sharon
7. LBH Masyarakat
8. LBH Keadilan Banten
9. Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria
10. Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Anshor
11. Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah
12. Posbakum Aisyiyah DKI Jakarta
13. Pusat Bantuan Hukum (PBH) UNAS
14. LKBH UPN Veteran Jakarta
15. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Universitas Esa Unggul
16. Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia

Peserta online:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. LBH Bandung | 11. LBH APIK Banten |
| 2. LBH Padang | 12. LBH APIK Medan |
| 3. PBHI Sulsel | 13. LBH APIK Palembang |
| 4. PBHI Lampung | 14. LBH APIK Kalimantan Timur |
| 5. LKBH Sarneli | 15. LBH APIK Pontianak |
| 6. PBHI Sulawesi Selatan | 16. LBH APIK Sulawesi Selatan |
| 6. Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu | 17. LBH APIK Sulawesi Tengah |
| 7. LIBU Perempuan Sulteng | 18. LBH APIK Jayapura |
| 8. LBH APIK Semarang | 19. LBH APIK Bali |
| 9. LBH APIK Yogyakarta | 20. LBH APIK NTB |
| 10. LBH APIK Kota Batu Malang | 21. LBH APIK NTT |